

BAB.V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kesimpulan berikut ini didasarkan atas hasil penelitian, dan pembahasan, serta kajian kepustakaan yang relevan dan temuan selama penelitian berlangsung.

Berdasarkan hasil temuan penelitian terungkap bahwa mekanisme interdependensi tugas, dan interdependensi faktor potensi, serta interdependensi hasil dan keselarasan aktivitas dengan tuntutan kelompok kerja, belum berjalan sesuai dengan perangkat hukum dan konsepsi yang melandasinya.

Keadaan di atas berdampak terhadap proses dan hasil koordinasi yang bersifat instansional, fungsional, dan teritorial, dalam perencanaan, dan pelaksanaan, serta pengawasan penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun di kotamadya Bandung. Dengan demikian secara umum Tim Koordinasi Wajar Dikdas belum berdaya secara optimal, dilihat dari peran dan fungsi instansi yang terkait.

Implikasinya adalah bagaimana pihak berwenang menentukan langkah yang tepat, dalam upaya memberdayakan peran serta masyarakat internal yang terkait dalam Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun di kotamadya Bandung.

Secara khusus, beberapa pokok kesimpulan penelitian ini terutama dirumuskan berkenaan dengan fokus permasalahan tesis ini.

Berdasarkan temuan empiris di lapangan berkenaan dengan mekanisme kerja komponen instansi terkait dalam Tim Koordinasi Wajar Dikdas, sedikitnya ditemukan empat hal antara lain:

Pertama, mekanisme interdependensi tugas, yang berkenaan dengan aturan, dan perangkat kerja, serta kedekatan anggota, masih belum selaras dengan landasan operasional. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhinya, antara lain :

- (1) Persepsi dan sikap personil mengenai keterlibatannya dalam Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun terbatas pada turut memberikan informasi kepada *leading sector*;
- (2) Keterbatasan kewenangan dan kebijakan dari tiap-tiap individu dalam mengambil prakarsa dalam Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun;

Kedua, mekanisme interdependensi faktor potensi, yang berkenaan dengan rencana dan pelaksanaan program kerja serta pengembangan Tim, masih belum selaras dengan landasan operasional. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhinya antara lain :

- (1) Sulitnya mengadakan pertemuan khusus, disebabkan adanya kepentingan layanan utama antara anggota yang mewakili instansinya dengan kepentingan Tim Koordinasi Wajar Dikdas. Sehingga hanya terbatas pada saat pelaksanaan Rakorda;
- (2) Lemahnya sangsi dalam landasan hukum yang dipedomani;
- (3) Kurang sepadannya antara proses sosialisasi keanggotaan dengan tuntutan Kebijakan Penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun ;
- (4) Ide dasar kebijakan tidak didukung perhitungan anggaran yang memadai.

Ketiga, mekanisme interdependensi hasil, tidak selaras sama sekali dengan konsepsi manajemen. Hal tersebut disebabkan dalam landasan operasionalnya pun tidak tersurat, nampaknya diselaraskan dengan *karakteristik kebijakan wajib belajar pendidikan dasar ala Indonesia*. Yang titik beratnya baru pada tahap memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dasar. Sehingga faktor imbalan, dan pengakuan serta penghargaan dan faktor pengendalian tidak jelas.

Keempat, keselarasan aktivitas dan tuntutan kelompok kerja, dalam Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun, tidak selaras dengan landasan operasional. Hal tersebut sangat terkait dengan keadaan penjelasan temuan pertama, kedua dan ketiga.

Mekanisme yang belum optimal tersebut, memberikan konsekuensi kepada penyelenggara dalam hal ini Depdikbud sebagai *leading sector*, untuk mengambil prakarsa. Oleh karena itu Sekretariat Tim Koordinasi, melakukan upaya-upaya optimal, seperti pola jemput informasi, dan kirim informasi, serta olah informasi dan menjadi sebuah laporan yang dibahas pada saat Rakorda.

Berdasarkan temuan di lapangan, berkenaan dengan pemberdayaan peran dan fungsi unsur-unsur terkait dalam Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun, yaitu adanya prakarsa dari pihak Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun di kotamadya Bandung. Mempertimbangkan hasil analisis masalah yang dihadapi Tim Koordinasi, maka dilakukan pembinaan pada tingkat sekretariat kotamadya dan tingkat kecamatan. Sedi- kitnya ditemukan dua hal antara lain :

Pertama, melakukan pembinaan pengembangan Sekretariat Tim Koordinasi Wajar Dikdas pada tingkat kotamadya. Pembinaan dilakukan secara umum meliputi :

- (1) Konsolidasi instansional yang terkait dan paling relevan dalam menunjang keberhasilan Tim Koordinasi;
- (2) Meningkatkan kinerja sekretariat dari tingkat kecamatan

sampai kotamadya, melalui rapat-rapat yang ditindaklanjuti dengan operasional;

- (3) Memadukan antara pelaksanaan kebijakan pembinaan penyelenggaraan pendidikan dengan pelaksanaan Wajar Dikdas di seluruh wilayah kotamadya;
- (4) Menyederhanakan keterlibatan instansi dalam operasional, sehingga tidak perlu menunggu uluran pihak lain.

Kedua, pembinaan Sekretariat Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun pada tingkat kecamatan yang dianggap perlu adanya pembinaan. Hal tersebut atas dasar pertimbangan perolehan APK dan APM rendah (di bawah 40%), sedangkan jumlah penduduk usia SLTP tinggi melebihi wilayah kecamatan lain di kotamadya Bandung. Pembinaan dilakukan secara khusus, melalui pengembangan Kolaborasi Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun di wilayahnya.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, berkenaan dengan hasil pemberdayaan Tim Koordinasi Wajar, diperoleh gambaran umum yakni adanya peningkatan aktivitas operasional khususnya di Sekretariat Wajar Dikdas 9 Tahun tingkat kotamadya. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari komitmen, dan tanggung jawab anggota. Sedangkan gambaran khusus dari hasil pengembangan Kolaborasi Tim Koordinasi Wajar Dikdas di tiga kecamatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1) Terbentuknya kelompok kerja berdasarkan garapan penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun, berdasarkan pada hasil pengembangan Kolaborasi Tim Koordinasi di wilayahnya;
- (2) Terwujudnya program jangka pendek dalam upaya mengimplementasikan pemahaman kolaborasi dalam kelompok kerja pendataan dan pemetaan; penyuluhan dan publikasi; pemantauan dan evaluasi; penerapan pola-pola Wajar Dikdas; pembentukan forum komunikasi.
- (3) Bentuk konkret peranserta fisik di suatu wilayah masih belum "nampak" sebab masih memerlukan pembinaan secara intensif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi mengenai pelaksanaan kebijakan yang harus ditempuh oleh pihak pemegang keputusan, dalam memberdayakan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun, serta rekomendasi untuk kepentingan akademik dan ilmiah lebih lanjut.

1. Rekomendasi untuk kepentingan praktis bagi para pengambil keputusan (khususnya pejabat yang termasuk dalam Tim Koordinasi Wajar Dikdas, pada tingkat propinsi, kabupaten/kotamadya, dan kecamatan direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Mengingat pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun merupakan kebijakan untuk kesejahteraan rakyat melalui pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan dasar, maka diperlukan adanya penanganan serius dalam aktivitas Tim Koordinasi. Penanganan ini diupayakan melalui langkah konkret berdasarkan pedoman yang ada, dan konsepsi koordinasi serta selaras dengan kemampuan dan potensi wilayah. Dengan pedoman dan konsepsi koordinasi maka efektivitas Tim Koordinasi akan tercapai.
- b. Potensi internal Tim Koordinasi merupakan modal dasar untuk, memberdayakan potensi-potensi eksternal. Oleh karena itu untuk menumbuh kembangkan peranserta masyarakat terlebih dahulu berdayanya potensi internal Tim Koordinasi Wajar Dikdas. Salah satu pendekatan konsepsi pemberdayaan ialah melalui penggunaan Model Kolaboratif Tim Koordinasi. Pendekatan tersebut sangat dimungkinkan jika pejabat yang berwenang dalam menangani Tim Koordinasi Wajar Dikdas, mampu berkreasi dalam melakukan perbaikan kinerja.

Adapun yang dimaksud dengan Model Kolaboratif Tim Koordinasi Wajar Dikdas itu dijelaskan sebagai berikut ini.

Tujuan :

(1) Tujuan Umum

Tujuan umum dari pengembangan Model Kolaboratif Tim Koordinasi bagi para anggota, adalah mendramatisir perilaku anggota tim menunjukkan peranannya sesuai dengan tugas dan wewenang instansinya dalam arti mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh tim secara terpadu dan terarah.

(2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari pengembangan kolaborasi

- (a) Meningkatkan pengetahuan para anggota bagaimana tentang ilmu organisasi berdasarkan pola kebersamaan atas dasar peran dan kemitraan;
- (b) Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam tim koordinasi, melalui optimalisasi peran individu yang mengarah pada peran kelompok;
- (c) Mempunyai strategi, taktik memberdayakan potensi-potensi melalui proses kemitraan;
- (d) Meningkatkan keterampilan operasional koordinasi sebagai anggota tim, sereta dapat memikat peranserta masyarakat dalam menuntaskan Wajar Dikdas 9 Tahun di wilayah kerjanya.

(3) Sasaran

Yang dimaksud sasaran dalam pengembangan Model Kolaboratif ini adalah para anggota yang terkait dalam Tim Koordinasi pada tingkat kecamatan, dan kelurahan. Anggota tersebut terdiri dari perwakilan instansi yang ada di sekretariat Tim Koordinasi kecamatan.

Pemberdayaan peran dan fungsi dalam mekanisme kerja yang ingin dicapai dalam pengembangan kolaborasi ialah:

- merumuskan strategi dan taktik yang sesuai dengan potensi anggota Tim Koordinasi dan melaksanakan visi, misi, yang diemban serta pengambilan keputusan operasional melalui konsensus
- menggunakan strategi dan taktik pemberdayaan potensi eksternal sebagai mitra kerja Tim Koordinasi
- merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program berdasarkan keterpaduan potensi anggota dan rasa kebersamaan, serta kemitraan baik internal maupun eksternal
- menyikapi potensi-potensi dan mengarahkan serta pemecahan masalah yang dihadapi Tim Koordinasi
- mengembangkan sikap otonomi yang khas dari suatu Tim Koordinasi

(4) Pola Pengembangan Model Kolaborasi Tim Koordinasi Wajar 9 Tahun

Pengembangan kolaborasi tim ini melibatkan instansi terkait yang menangani Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun, yaitu Kandep Dikbud kotamadya Bandung, Dinas P dan K kotamadya, Kantor Depag, dan Kantor Pemerintah Daerah kotamadya Bandung, serta beberapa instansi yang dianggap paling relevan.

Keterlibatan yang optimal dari beberapa instansi/dinas terkait, sangat diperlukan agar pelaksanaan pembiayaan dapat berjalan lancar. Langkah-langkah konkret dalam pelaksanaan kolaborasi tim adalah dengan :

- membuat proposal pengembangan kolaborasi tim kepada beberapa instansi/dinas terkait dengan persetujuan pihak berwenang
- bila persetujuan telah disepakati selanjutnya ditentukan waktu, tempat, materi pengembangan, biaya dan panitia pelaksana

(5) Struktur dan Prosedur

Pengembangan Model Kolaboratif Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun secara struktural sebagai berikut :

- adanya Panitia Pengarah yang terdiri dari Kakandep Kotamadya dan Kepala Dinas P dan K Kotamadya Bandung

- adanya panitia pelaksana terdiri aparat Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat

(6) Pelaksanaan Pengembangan Model Kolaboratif

(a) Persiapan

Untuk lancarnya pelaksanaan pengembangan tim, sebagai tahap persiapan mencakup;

- membuat proposal pengembangan yang disertai surat perijinan dari instansi terkait
- melakukan rapat persiapan pelaksanaan
- menentukan dan menghitung jumlah peserta
- memperbanyak modul-modul bagi para peserta
- persiapan perlatan dan media
- menghitung jumlah dana yang diperlukan

(b) Materi/Topik Pengembangan Tim

- kebijakan Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun
- transformasi dan kolaborasi tim
- kepemimpinan kolaborasi
- pola dan analisis potensi melalui jaringan kerja sebagai alternatif
- simulasi dan diskusi implementasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun di wilayah kecamatan

(c) Fasilitator/Nara Sumber

Pelaksana pengembang kolaborasi tim adalah beberapa orang dari Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud propinsi Jawa Barat.

(d) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kolaborasi tim disesuaikan dengan kemungkinan berbagai pihak

(e) Hasil akhir yang diharapkan

(1) Terbentuknya tim koordinasi tingkat kecamatan, yang diisi oleh orang yang dapat memainkan peranan sebagai:

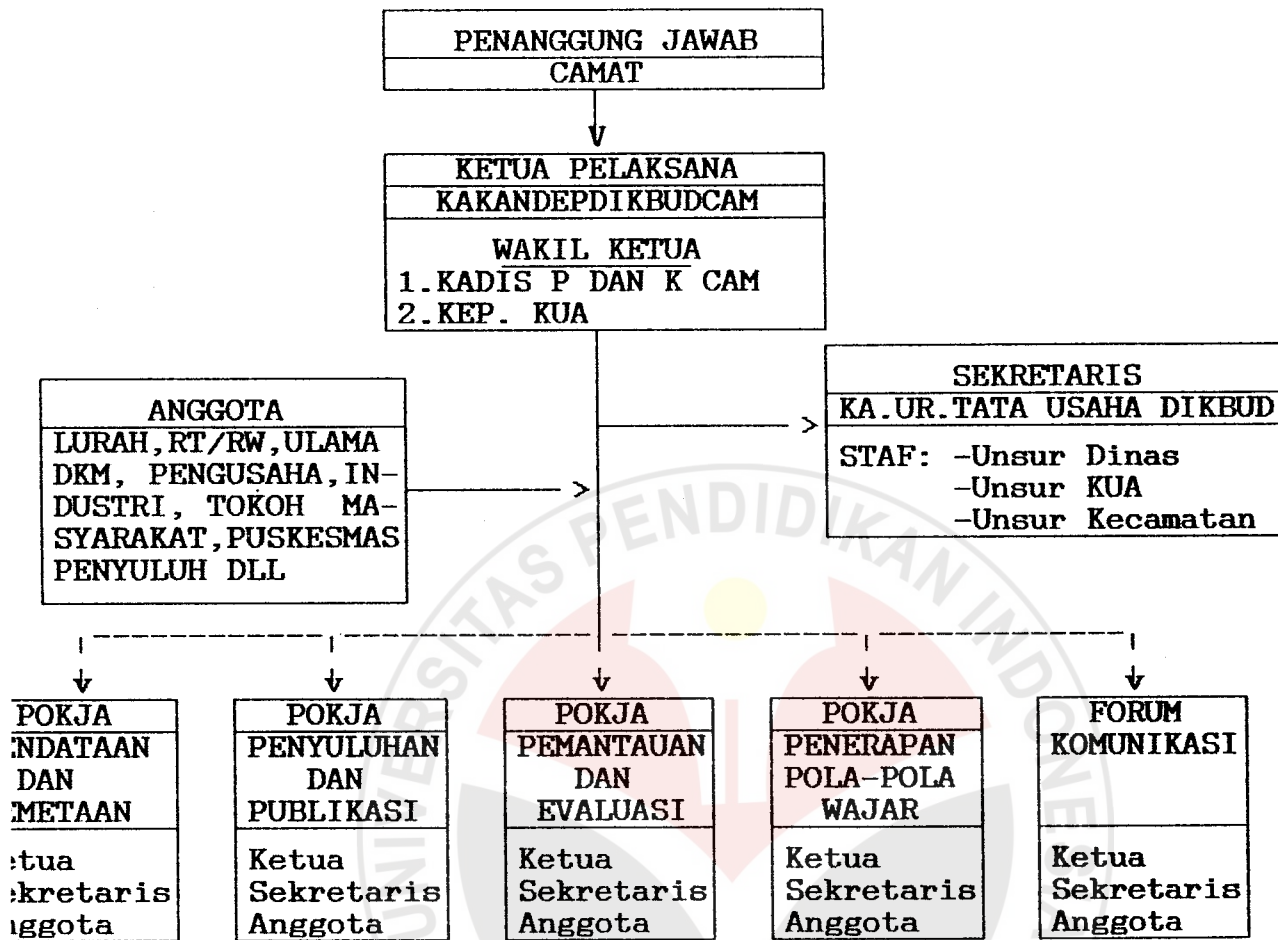
- *driver dan sekaligus executor*
- *planner*
- *enabler*
- *controller*

(2) Adanya program kerja tim berdasarkan analisis potensi dan kebutuhan pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun di tiap wilayah kecamatan sesuai dengan fungsinya

(3) Adanya program pengembangan forum komunikasi tim dan masyarakat di wilayah kecamatan dengan harapan adanya peningkatan partisipasi meliputi:

- bentuk non fisik
- bentuk fisik

BAGAN MODEL KOLABORATIF PEMBERDAYAAN KELOMPOK KERJA
TIM KOORDINASI WAJAR DIKDAS 9 TAHUN



Catatan : Ketua Pokja dan Anggota dipilih oleh mereka di antara para anggota Kelompok Kerja Wajar Dikdas

————— Garis instruksi
----- Garis konsultasi

Setiap Kelompok Kerja merumuskan tujuan bersama, menetapkan agenda kerja bersama, menetapkan jadwal pertemuan rutin dan menetapkan tugas bersama, setiap anggota mempunyai peran berbeda, ada yang berperan sebagai driver, planner, enabler, executor, dan controller

Mekanisme kerja Kelompok Kerja dibina dan dipantau secara rutin oleh sekretariat Wajar Dikdas kecamatan

2. Rekomendasi untuk kepentingan studi dan penelitian lebih lanjut

Penulis berpendapat bahwa studi ini belum mencapai tujuan yang maksimal sebagaimana yang diharapkan, karena disadari masih banyak kelemahan-kelemahan. Walaupun demikian dari sudut pandang penulis bahwa penelitian ini telah mengungkapkan mekanisme kerja Tim Koordinasi Wajar Dikdas, dan upaya perbaikan serta hasil-hasil yang diperoleh.

Oleh karena itu disarankan agar :

- a. Perlu adanya penelitian yang sama di daerah berbeda sebagai pembanding keterandalan informasi, serta dapat menguatkan keterandalan teori kolaborasi;
- b. Perlu adanya penelitian tindak lanjut dari pemberdayaan Tim Koordinasi bagi peningkatan peranserta masyarakat melalui pengujian empiris secara eksperimental terhadap model pendekatan yang disarankan dalam paragraf terdahulu.